



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
PPID PROVINSI PAPUA**

Fax. 537522 (0967)/Email : ppidpapua@gmail.com/Website : ppidutama.papua.go.id
Jl. Soa Siu Dok II Jayapura - Papua

LAPORAN

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017



**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA PROVINSI PAPUA
PPID UTAMA
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Pujian Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas penyertaan dan Karunia Nya, Laporan pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Papua tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian dari pada Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Papua yang dilakukan baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten/kota dengan sumber anggaran dari APBD Tahun 2017, dari Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua. PPID Provinsi Papua juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang mamadai guna kualitas Pelayanan informasi publik dilingkungan Pemerintah Papua, termasuk mengembangkan Aplikasi pelayanan informasi secara Online, semua itu adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Papua berupaya memberikan pelayanan yang cepat, lancar, mudah dan nyaman, sederhana menuju Pemerintahan yang baik .

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan PPID Provinsi Papua kegiatan pelayanan informasi publik dan hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan – masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan informasi publik yang akan datang dan laporan ini merupakan laporan pertama untuk Kemendagri RI dan laporan ke dua yang dapat disampaikan ke Komisi Informasi Provinsi Papua dan Komisi Informasi Pusat.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan kepada semua pihak yang telah membantu mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga akhir pelaporan tahun 2017 disampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan memberkati setiap aktivitas kita dalam melayani mMasyarakat.
Amiin.

Jayapura, Maret 2018

Kepala Biro Humas dan Protokol
Selaku PPID Provinsi Papua


ISRAIL ILOLU, SE, M.Si
NIP. 19630517 198608 1 006

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	: i
	Daftar Isi	: ii
I	KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	: 1
II	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	: 2
	A. Ruang dan Desk layanan	: 2
	B. Penyediaan Akses Informasi	: 3
	C. Sumber Daya Manusia	: 3
III	OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	: 4
	A. Kegiatan PPID Provinsi Papua Tahun 2017.....	: 5
	B. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.....	: 6
	C. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	: 7
IV	CAPAIAN PPID PROVINSI PAPUA.....	: 7
V	ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	: 8
VI	KENDALA DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	: 9
VII	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	: 9
VIII	PENUTUP.....	: 10
IX	LAMPIRAN- LAMPIRAN :	
	TABEL PERMOHONAN INFORMASI	
	TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI di PPID	
	PEMBANTU PROVINSI PAPUA TAHUN 2017	
	TABEL NAMA ATASAN DAN KETUA PPID DI LINGKUNGAN	
	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	
	TABEL REKAPITULASI PPID KABUPATEN/KOTA SE-PAPUA TAHUN	
	2017	
	TABEL HASIL MONEV	
	DOKUMENTASI	

**LAPORAN
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PROVINSI
PAPUA TAHUN ANGGARAN 2017**

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Provinsi Papua telah menindaklanjuti Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dengan Surat Keputusan Gubernur Papua nomor 158 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan pada Tahun 2012 SK PPID direvisi dengan terbitnya SK Perubahan Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penetapan dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua atas perubahan lampiran I, dan terakhir setelah terbitnya Permendagri Nomor 3 tahun 2017, maka PPID Provinsi Papua telah melakukan harmonisasi SK PPID Provinsi Papua yang sementara masih proses pada Biro Hukum.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua diterbitkan agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata terpenuhi, maka pemerintah provinsi papua berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 188.4/10401/SET/2015 tentang Standar Operasi Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, merupakan regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Dimana Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua secara ex Oficio sebagai Ketua PPID Provinsi Papua, Struktur dan susunan keanggotaan dan susunan yang sementara di harmonisasi terdiri dari Biro Humas, Diskominfo, Biro Hukum dan Bappeda sebagai susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi(PLID) Provinsi Papua yang disesuaikan dengan Tusi yang melekat untuk melakukan pelayanan informasi.

II. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Provinsi Papua dengan menggunakan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan sesuai dengan SOP PPID dalam melakukan prosedur layanan Informasi PPID Provinsi Papua

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Provinsi Papua sebagai berikut :

A. Ruang Desk Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan PPID Provinsi Papua terdiri dari meja layanan dimana 2 (dua) petugas PPID yang bertugas menerima tamu dinas 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang petugas PPID yang menerima permohonan informasi, dimana petugas dinas menerima surat dinas yang langsung diserahkan ke Tata usaha, sementara petugas PPID adalah menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan (registrasi) sesuai syarat ketentuan cara permohonan informasi, pada meja layanan terdapat Komputer, Printer (yang mempunyai fasilitas foto copy), DIP (yang telah tersedia), media leaflet /brosur, Tata cara permohonan informasi dan buku agenda tamu/buku registrasi, formulir form permohonan informasi, juga tersedia ruang tamu serta ruang pelayanan sekaligus merupakan ruang kerja Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi sebagai PPID Pembantu , fasilitas yang di miliki 2 unit komputer, 2 unit printer, 1 unit Laptop 1 unit AC dan 2 meja, 4 kursi juga tersedia ruang perpustakaan sekaligus berfungsi sebagai ruang apabila ada data dan informasi yang hanya bisa dilihat dan tidak bisa difoto, dan 1 komputer yang terkoneksi dengan internet papua.go.id dan media woll.

B. Penyediaan Akses Informasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Provinsi Papua, secara cepat, tepat, mudah sederhana, permohonan informasi dapat melakukan permohonan informasi melalui :

1. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Ruang Kantor Biro Humas dan Protokol Komplek kantor Gubernur, alamat jln Soa siu Dok II Bawah lantai 1 (samping kantor Pos) ruang masuk Sasana Krida ruang pertemuan,
2. Melalui telepon/fax (0967) 537522 dan identitas diri dapat difaksimile
3. Mengisi formulir dan mengirimkan email ke ppidprov.papua@gmail.com
4. Tersedia Komputer disk play yang terletak pada ruang masuk sasana Krida yang terkoneksi pada website papua.go.id, yang dapat digunakan untuk melakukan permohonan informasi dengan menggunakan jaringan wifi Biro Humas yang disediakan Dinas Kominfo Provinsi Papua.
5. Atau pada Media sosial Fb Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, dengan cara mengisi form yang dicantumkan dan pemohon mengirimkan form dan foto KTP.
6. Melalui website PPID Utama <http://ppid.utama.papua.go.id> yang dikelola oleh Kominfo yang terhubung langsung dengan instansi yang mengelola website resmi pemerintah Provinsi Papua papua.go.id dan pada PPID SKPD/Pembantu membuat sub domain dan dikelola pada masing-masing SKPD. Penyediaan akses informasi melalui website diharapkan mempermudah pelayanan informasi dan koordinasi sesama badan publik terutama pada publik secara online yang telah terdapat kanal-kanal salah satunya permohonan informasi agar lebih cepat, efesiesi dan efektif dalam pengelolaan layanan informasi publik.

C. Sumber Daya Manusia

Salah satu hal penting adalah tersedianya sumber daya manusia yang akan mengelola dan melakukan pelayanan informasi publik di PPID Provinsi Papua, sesuai dengan standar layanan pemerintah provinsi papua atas kebijakan pimpinan, melalui SK PPID Provinsi Papua, dimana Ketua PPID Provinsi Papua adalah Kepala Biro Humas dan PPID Pembantu Kabag Dokumentasi dan Publikasi, dan Bidang pendukung Sekretariat PLID adalah Kepala Sub Sub Bagian Tata Usaha Biro Humas dan Protokol, yang dibantu oleh Kasubag Dokumentasi Biro dan Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi adalah Kepala Pusat data dan Analisis Pembangunan pada

Bappeda, Kasubag Analisis data (Humas). Kasie Pengelolaan Informasi dan Layanan Publik pada dinas Kominfo dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Kabag Humas pada Biro Humas dan Protokol, Kasubag Publikasi, Kasubag Hubungan Kelembagaan Biro Humas dan Protokol, Kasie Statistik Diskominfo Provinsi Papua dan Kepala Bagian Bantuan Hukum, adalah Kabag bantuan Hukum pada Biro Hukum, pembagian tugas ini karena melekat pada tugas pokok dan fungsi. Agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik maka diperlukan kerjasama dan komunikasi setiap saat, dan PPID Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi pada PPID SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dari Hasil monev yang dilakukan PPID Provinsi Papua ke PPID SKPD adalah ketersediaan sumber daya manusia dan komitmen pimpinan yang masih perlu ditingkatkan. sehingga permohonan informasi masih melalui satu pintu yaitu pemohon mengajukan ke PPID Provinsi Papua dan setelah diterima PPID Provinsi Papua berkoordinasi ke PPID SKPD terkait data dan informasi yang diminta. Oleh sebab itu PPID Provinsi Papua masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dan Pelayanan informasi serta komitmen pimpinan di tingkat PPID SKPD. untuk pencerahan karena sampai saat ini laporan dari PPID SKPD masih ada 2 SKPD yang belum menunjuk dan membentuk PPIDnya (SKPD) baru, sementara tingkat Kabupaten/Kota dari 29 baru terbentuk sebanyak 13 Kabupaten/Kota, persoalan yang dihadapi karena di kab/Kota pergantian pejabat salah satu faktor penghambat dalam pembentukan PPID, dan sampai saat ini PPID Provinsi Papua belum menetapkan DIP PPID Provinsi Papua sementara proses termasuk Informasi yang dikecualikan (PPID SKPD belum menyusun DIPnya).

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sistem pelayanan informasi di PPID Provinsi Papua saat ini disamping dilaksanakan dengan cara konvensional juga telah akan mengembangkan Aplikasi yang dapat melayani permohonan informasi secara online yang terintegrasi dengan PPID Kementerian dalam Negeri dan Sapa (sementara masih disetting IP nya ke IP Kemendagri) sementara itu PPID juga masuk dalam susunan keanggotaan dan menjadi fungsi PPID yaitu aplikasi Lapor dari KSP dengan terbitnya Peraturan Gubernur No 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, serta media-media lainnya seperti iklan

layanan PPID yang kami tayangkan di media Elektronik (Televisi dan Radio), media Cetak (Kontrak kerjasama Biro Humas dan Media (Lokal) dan televisi swasta (TV Jaya).

Seiring perkembangan dan sosialisasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua melalui Tim Pembentukan dan Penguatan PPID SKPD dan sosialisasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pergub 28 Tahun 2013, serta tata cara permohonan informasi dan tata cara Penyelesaian Sengketa informasi kepada PPID SKPD dan kepada publik yang telah dilaksanakan berdampak dengan terbentuk komunitas di masyarakat yaitu "Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru" (Ko Tra Pengaruh), dimana komunitas ini sudah memahami tentang Hak publik dalam memperoleh informasi dan pentingnya Transparansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Papua, dimana dengan terbentuknya Komunitas ini Komisi Informasi Papua telah menyelesaikan dan proses sengketa informasi.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Papua Tahun 2017 adalah :

A. Kegiatan PPID Provinsi Papua/Utama yaitu :

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada PPID SKPD terkait kelengkapan PPID sesuai dengan Peraturan Gubernur bersama dengan Komisi Informasi Papua, Dinas Kominfo yaitu melihat langsung, kelengkapan PPID termasuk Web dimana sebagian besar belum ter update sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan Penguatan Kapasitas kepada 52 PPID SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan sosialisasi UU KIP dan Pergub No 28 tahun 2013, (sekaligus monev);
3. Menata Kelengkapan Desk layanan PPID Provinsi Papua terkait Desk layanan.
4. Mengkoordinasikan ke PPID Kab/Kota terkait pembentukan PPID di Kab/kota serta kelengkapan PPID melalui wa, email dan pada waktu pertemuan-pertemuan tingkat Provinsi;
5. Melakukan Sosialisasi tugas pokok dan fungsi PPID paskah Peraturan Kemendagri no 3 tahun 2017 dengan menghadirkan Kabid fasilitasi Pengaduan dari Kemendagri RI, sekaligus mensosialisasikan Sapa dan Sistim PPID serta LAPOR;
6. Membagikan leaflet dan brosur Tata cara Permohonan Informasi dan Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi setiap kali pertemuan skala Provinsi

(Raker Bupati/Walikota se Papua dan Rakor-teknis yang diadakan pada ruang Sasana Krida kantor Gubernur.

7. Membagikan Benner Tata cara Permohonan dan Penyelesaian Sengeta Informasi pada 52 PPID SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
8. Melakukan konsultasi terkait tugas pokok dan fungsi PPID dan Penyusunan Daftar Informasi Publik pada PPID SKPD dengan cara mengundang PPID SKPD yang belum membuat DIP yang dilaksanakan Ruang Pelayanan Sekretariat PPID Provinsi Papua, (melalui surat Gubernur Papua)
9. Mengirimkan hasil Monev kepada PPID SKPD terkait kelengkapan PPID SKPD untuk ditindaklanjuti;
10. Melakukan Rapat-rapat dengan Dinas kominfo terkait dengan update bahan informasi melalui website PPID Utama;
11. Mendampingi PPID SKPD (bagi PPID SKPD yang disidangkan) setiap kali sidang sengketa Informasi yang dilakukan pada Komisi Informasi Provinsi Papua.
12. Mengirimkan draft SK harmonisasi PPID Provinsi Papua ke Biro Hukum untuk ditetapkan.
13. Membagikan benner elektronik, bagi PPID SKPD yang mempunyai semangat untuk melakukan pelayanan informasi dan kelengkapan PPIDnya.

B. Kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi PPID

Selama Tahun 2017 PPID Provinsi Papua, menerima 250. (Dua ratus lima puluh) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat antara lain mahasiswa, pelajar, organisasi kemasyarakatan, Ondoafi, (Tokoh Adat) Tokoh Masyarakat, Perempuan, LBH/LSM, BUMD/BUMN dan badan Publik lainnya. Permohonan informasi yang pemohonnya adalah instansi dan Kab/Kota yang datang langsung ke desk layanan PPID Provinsi Papua dan PPID Provinsi Papua mencatat sebagai pemohon informasi, yang tidak melalui surat Dinas, dengan mengajukan permohonan informasi ke PPID Provinsi Papua dimana jenis informasi yang dimohonkan adalah kategori/jenis informasi yang tersedia setiap saat yaitu permintaan Buku Kumpulan peraturan-peraturan Keterbukaan Informasi Publik, Leaflet, Brosur, kumpulan Peraturan Gubernur, Peraturan daerah, foto kegiatan pimpinan, kumpulan sambutan, kliping, serta kumpulan berbagai kebijakan pimpinan yang oleh Humas di cetak dan dijadikan Buku sehingga publik/SKPD (sesuai dengan ketersediaan Buku yang dicetak). Dari seluruh permohonan tersebut ada 6 yang masih dalam proses dan telah diselesaikan

sesuai tabel, permohonan melalui jalur pemohon datang langsung ke Desk layanan PPID Provinsi Papua dan melalui email dan fb Biro Humas. Agar pelayanan informasi publik cepat tepat waktu, maka kebijakan yang dilakukan PPID Provinsi Papua, bagi PPID pembantu yang belum melakukan pelayanan informasi oleh PPID Provinsi mengambil alih dan data informasi yang dimohonkan PPID Provinsi Papua melakukan koordinasi dan PPID pembantu yang menguasai informasi tersebut akan menyediakan/menyerahkan kecuali informasi yang dikecualikan atau belum di dokumentasikan walaupun PPID pembantu tersebut belum menyusun DIP.(berlaku Informasi dan dokumentasi yang tersedia setiap saat dan berkala)

C. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2017 PPID Provinsi Papua melayani 1 (satu) keberatan melalui atasan PPID SKPD Provinsi dan PPID Utama kabupaten Keerom dan telah diselesaikan melalui proses sengketa di Komisi Informasi dengan hasil putusan yaitu Mediasi dan putusan sela , sepanjang sidang sengketa PPID Provinsi Papua mendampingi untuk memberikan penguatan dan spirit

IV CAPAIAN PPID PROVINSI PAPUA

Pada Tahun 2017 PPID Provinsi Papua dalam pemeringkatan telah menerima VLA2 (tahapan ke dua), dan PPID Provinsi Papua telah mengoptimalkan segala kemampuan yang ada, karena tahun 2016 telah divisitasi berarti masuk ke 15 besar, namun karena adanya kesalahan teknis di mana papua menggunakan akun resmi go.id yang telah diatur kapasitas emailnya sehingga tidak dapat mengirim atau menampung file yang zisanya besar sementara panitia menggunakan gmail dan yahoo. sehingga PPID Provinsi Papua pada pengiriman email FLA2 (questioner) tidak terkirim. Oleh sebab itu PPID Papua menyadari masih banyak hal - hal yang perlu dibenahi dalam memperoleh penghargaan pemeringkatan tersebut, namun yang penting saat ini PPID Provinsi Papua sementara membenah diri untuk berupaya mempersiapkan perangkat sarana dan prasaranan terutama SDM dan menyamakan pemahaman bagi pejabat publik untuk dapat memahami Undang-undang Keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu PPID Provinsi Papua dengan SK Ketua PPID membentuk Tim Percepatan Pembentukan dan Penguatan PPID SKPD dan Kab/Kota dan menggandeng Komisi Informasi Papua dan Kominfo untuk melakukan kunjungan ke Badan Publik khusus ke PPID SKPD dan badan publik pada umumnya serta Kabupaten/kota, untuk

mengadvokasi Pembentukan dan melakukan pendampingan/penguatan ke PPID SKPD agar menyiapkan perangkat/kelengkapan PPID sehingga dapat memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat yang mudah, sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya murah sesuai dengan undang-undang Keterbukaan Informasi publik.

Hasil kunjungan /monitoring dan evaluasi di PPID SKPD, Ketua PPID Provinsi Papua sebagai Ketua Tim Percepatan dan Penguatan PPID SKPD dan Kab/Kota melaporkan hasil kunjungan kepada atasan PPID yaitu Sekda melalui surat Edaran hasil Monev yang dikirimkan untuk ditindaklanjuti PPID SKPD dengan melengkapi (SK, Desk Layanan, SOP, website, DIP, Laporan dan Anggaran).sampai saat laporan ini dibuat masih ada 1 (satu) PPID SKPD yang belum melaporkan/menyerahkan SK PPIDnya (hasil monev terlampir)

V. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada pasal 17 menyebutkan bahwa Pembiayaan atas pelaksanaan tugas PPID Provinsi Papua dan PPID SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, untuk anggaran yang dikelola PPID Provinsi Papua /Utama dalam melaksanakan penguatan dan Pelayanan Informasi sebesar Rp. 80.250.000 yang diperuntukan untuk kunjungan ke 52 PPID SKPD/Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dan dibentuk Tim Percepatan Pembentukan dan Penguatan PPID SKPD, dimana narasumber adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua selaku PPID Provinsi Papua dan 3 (tiga) anggota Komisioner Informasi Papua, yang memberikan materi UU No 14 Tahun 2008, Pergub No 28 Tahun 2013, serta penyusunan Daftar Informasi Publik, kelengkapan Desk layanan serta mengikuti kegiatan PPID tingkat Nasional. tahun 2018 telah masuk dalam Papua PU Rencana yaitu Rancangan awal RKPD Provinsi Papua 2019, dimana dalam penjabaran Program Prioritas 3 Daerah adalah Peningkatan Pelayanan umum, dengan fokus prioritas "Peningkatan standar pelayanan publik, yang terdiri dari (1) Program Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik (sebagai penanggungjawab Diskominfo), (2) Program Transparansi sistem pelayanan publik (sebagai penanggungjawab Biro Humas), (3) Program Peningkatan sarana dan prasarana sistem pelayanan publik, (penanggungn jawab: Bapenda, RSUD Dok II, RSUD Abepura dan RS Jiwa).

VI. KENDALA DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2013 yang merupakan Implementasi UU N 14 Tahun 2008 di PPID Provinsi Papua dalam perjalanan pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak terlepas dari kendala namun dengan adanya kendala itu akan memberikan semangat para PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatasi kendala dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di PPID SKPD masing- masing.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu :

1. Tidak semua Kepala SKPD mempunyai komitmen yang sama terhadap Implementasi UU KIP, dengan adanya SKPD yang belum membentuk PPID SKPD, (sesuai hasil monev);
2. Belum tertatanya DIP sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (pasal 9,10.11) sehingga sampai laporan ini disampaikan Daftar Informasi publik di masing- masing PPID SKPD belum menyampaikan ke PPID Provinsi Papua sehingga PPID Provinsi Papua belum melakukan penetapan DIP PPID Provinsi Papua;
3. Sebagian besar PPID SKPD belum menempatkan TIM untuk bekerja hanya sebatas penerbitan SK, dan terbatasnya SDM yang menguasai IT serta belum tersosialisasinya tingkat PPID SKPD pada anggota PPIDnya serta kurangnya sarana dan prasarana;
4. Akibat adanya Mutasi/Pergantian Pejabat pengelola yang telah di SK kan dan telah mempunyai kemampuan teknis dimutasikan dan belum tersosialisasi ditingkat PPID SKPDnya.
5. Sistem belum berjalan dalam rangka penyediaan pelayanan Informasi Publik, karena belum menerapkan SOP PPID Provinsi Papua.

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi UU KIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dimana Sekretaris Daerah memimpin Rapat dan menghadirkan Ketua PPID Provinsi Papua dan mengundang Komisi Informasi untuk memberikan pencerahan dan tata cara sengketa informasi dan dari Kemendagri RI bagi Pimpinan SKPD dan Ketua PPID SKPD/Pembantu;

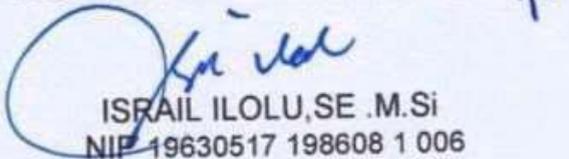
2. Mengukuhkan Forum PPID Provinsi dan Kab/Kota se Papua dan Bintek Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publikasi.
3. Melakukan Pengembangan aplikasi pengelola database informasi yang terkoneksi dengan Sistem PPID Kementerian Dalam Negeri dan Sapa;
4. Peningkatan kapasitas pengelola informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/kota dengan mengadakan pertemuan PPID tingkat Provinsi Papua dan kab/Kota;
5. Melakukan Revisi SK PPID Provinsi Papua dengan mengacu pada Permendagri no 3 Tahun 2017, dengan tidak mencantumkan nama pejabat tapi menggunakan nama jabatan;
6. Memberikan Penghargaan kepada PPID SKPD yang selama ini melakukan pelayanan informasi dan memberikan hukuman bagi PPID SKPD yang tidak taat kepada Peraturan Gubernur dan UU KIP 2008 melalui teguran.
7. Sementara Komisi informasi Papua lagi gencar dengan program dan kegiatan mensosialisasikan Hak badan Publik terkait UU Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu PPID Provinsi Papua terus berupaya memberikan penguatan, koordinasi dan pembinaan kepada PPID SKPD Baik Tingkat Provinsi maupun kab/kota untuk lebih memperkuat layanan informasi di Badan publik.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan sebagai gambaran dan bahan informasi, dokumentasi dalam pelaksanaan layanan informasi publik di provinsi papua dalam implementasi undang-undang Keterbukaan informasi publik. Dan apabila dalam penyampaian laporan ini tidak sesuai atau kurang lengkap, diharapkan masukan-masukan untuk perbaikan kedepan, semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat, menuju Pemerintahan Yang baik.

Jayapura, Maret 2018

Kepala Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Papua
Selaku Ketua PPID Provinsi Papua


ISRAIL ILOLU, SE .M.Si
NIP 19630517 198608 1 006

**TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PADA PPID UTAMA
PEMPROV. PAPUA
PERIODE TAHUN 2017**

NO	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		DITERIMA	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		MEDIA ELEKTRONIK	LANGSUNG			
1	JANUARI	3	50	53	-	-
2	FEBRUARI	4	100	104	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-
4	APRIL	1	-	1	-	-
5	MEI	-	1	1	-	-
6	JUNI	1	1	2	-	-
7	JULI	-	47	47	-	-
8	AGUSTUS	-	16	16	-	-
9	SEPTEMBER	-	5	5	-	-
10	OKTOBER	-	11	11	-	-
11	NOVEMBER	1	9	10	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-
		10	240	250	-	-

Jayapura, Maret 2018,

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SELAKU

KETUA PPID,



ISMAIL LOLOU, SE., M.Si

NIP. 19630517 198608 1 006

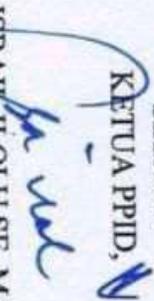
RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID PROVINSI PAPUA TAHUN 2017

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	JUMLAH PERMINTAAN DATA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN (HARI KERJA)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DI KABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DI TOLAK	ALASAN PERMOHONAN YANG DI TOLAK	
				SEMPENUHNYA	SEBAGIAN /PROSES		DI KECUALIKAN	TIDAK DIKULAS/BEUM SELESAI DI DOKUMENTASIKAN
JANUARI	53	3.628	35 menit	3.628	-	-	-	-
FEBRUARI	104	1.266	35 menit	1.266	-	-	-	-
MARET	-	-	30 menit	-	-	-	-	-
APRIL	1	5	20 menit	5	-	-	-	-
MEI	1	23	30 menit	23	-	-	-	-
JUNI	2	97	30 menit	97	-	-	-	-
JULI	47	191	35 menit	190	1	-	-	-
AGUSTUS	16	126	30 menit	122	4	-	-	-
SEPTEMBER	5	21	20 menit	21	-	-	-	-
OKTOBER	11	56	20 menit	56	-	-	-	-
NOVEMBER	10	216	30 menit	215	1	-	-	-
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	250	5.629	-	5.623	6	-	-	-

Jayapura, Maret 2018,

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

SELAKU

KETUA PPID, 

ISRAIL H. OLU, SE., M.Si

NIP. 19630517 198608 1 006

Tabel

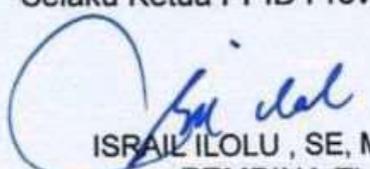
Rekapitulasi Permohonan Informasi Di PPID Pembantu Provinsi Papua
Tahun 2017

No	PPID SKPD /Pembantu di Lingkungan Provinsi Papua	Jumlah Permohonan Informasi	Keterangan
1	Biro Hukum Setda Provinsi Papua	-	Sampai akhir maret 2017 Biro Hukum belum menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi ke PPID Provinsi Papua, sesuai dengan hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan pada Bulan juli sampai September 2017
2	Biro Umum Setyda Provinsi Papua	-	Biro Umum sampai akhir Maret belum melayani permohonan infomasi sesuai dengan hasil Monev yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi papua bersama komisi Informasi papua.
3	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	250	Jumlah permohonan informasi sampai akhir Desember 2017 berjumlah 250 permohonan (daftar terlampir) permohonan sudah termasuk yang ditujukan ke PPID SKPD yang datang langsung ke desk Layanan PPID Provinsi Papua (Utama) dan Seketariatan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk menindaklanjuti permohonan informasi.
4	Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan per akhir Maret 2018, walaupun telah melakukan pelayanan informasi.
5	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan sesuai hasil monev
6	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev,
7	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev,
8	Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev,
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev,
10	Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan Laporan
11	Dinas Kehutanan Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan Laporan, permohonan ditujukan ke PPID Provinsi Papua
12	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev,
13	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan bulanan dan tahunan

14	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev,
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua	- -	Belum menyampaikan laporan, sampai akhir maret 2018 dan telah disengketakan
16	Dinas Pendidikan Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan, sampai akhir maret 2018
17	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Papua	-	SK PPID belum ada
18	Dinas Perhubungan Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan, sampai akhir maret 2018
19	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan, sampai akhir maret 2018
20	Dinas Perkebunan Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan, sampai akhir maret 2018
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	-	Belum terbentuk PPID
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan, sampai akhir maret 2018
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev
24	Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua	4	2 Dipenuhi, 3 lagi Proses dan 1 ditolak (karena belum didokumentasikan)
25	Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev
27	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev, sementara ada sidang sengketa informasi (sementara Proses), dan belum menyampaikan laporannya
28	Dinas Pariwisata Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev
29	Dinas Kebudayaan Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi , sesuai hasil monev
30	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov.Papua	-	Belum menyampaikan laporan bulanan, tahunan
31	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Papua	-	Belum menyampikan laporan tahun 2017 sengketa informasi dengan hasil putusan mediasi
32	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Prov. Papua	-	Belum menyampaikan laporan baik bulanan maupun tahunan

33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. Papua	-	Belum melayani permohonan informasi, sesuai hasil moneyv
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Prov. Papua	-	Belum melayani permohonan informasi, sesuai hasil moneyv
35	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan bulanan dan tahunan
37	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi, sesuai hasil moneyv
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi, sesuai hasil moneyv
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Papua	-	Belum menyampaikan laporan bulanan dan tahunan, dan belum merevisi SK
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	-	Belum melayani permohonan informasi, sesuai hasil moneyv
41	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
42	Badan Penghubung Daerah Prov. Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
44	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
45	Inspektorat Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
46	Sekretariat Dewan	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
47	Sekretariat MRP	-	Belum melakukan pelayanan informasi
48	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
49	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
50	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
51	Rumah Sakit Jiwa Abepura Provinsi Papua	-	Belum menyampaikan laporan tahunan
52	Sekretariat KORPRI Prov. Papua	-	Belum melakukan pelayanan informasi
JUMLAH		254	

Kepala Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Papua.
Selaku Ketua PPID Provinsi Papua


ISRAIL ILOLU, SE, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP.19630517 198608 1.006

DAFTAR NAMA ATASAN DAN KETUA PPID SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

NO	INSTANSI	PPID SKPD				NO KONTAK		KELENGKAPAN PPID SKPD							KET	
		ATASAN PPID		KETUA PPID		EMAIL	TELEPON	NO. SK PPID	SOP	DIP	DESK LAYANAN	WEBSITE	LAPORAN	ANGGARAN		MEDIA
		NAMA PEJABAT	JABATAN	NAMA PEJABAT	JABATAN											
1	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROV. PAPUA	ABNER KEHEK, SH., M.Hum	KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KAB/KOTA			188.4/359.a/TAHUN 2017 13 Juli 2017	X	X	X	Hukum.papua.go.id	X	X	V	MELENGKAPI
2	BIRO UMUM SETDA PROVINSI PAPUA	EMI ENEMBE,S.IP ,M.SI	KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI PAPUA	JUDI INDRADJAYA,SH. MM	KEPALA BAGIAN TU			555/0242/UMUM/2016 7 Januari 2016	V	X	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
3	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA	ISRAIL ILOLU, SE.,M.SI	KEPALA BIRO HUMAS & PROTOKOL SETDA PROV. PAPUA	ADRIANI, SH., MM	KABAG DOKUMENTASI & PUBLIKASI HUJU			821.2/III/A/Humas/TAHUN 2017 03 Mei 2017	V	V	V	Humas.protokol.papua.go.id	V	V	V	LENGKAP
4	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA	DANIEL PAHABOL S.Pd	KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. PAPUA	LINDA STELDA ONIBALA, S.Sos., MM	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN	Lindaonibala72@gmail.com	08127775972	061/216/RO.Orgs 18 Juli 2017	V	V	V	Orpa.papua.go.Org	X	X	X	MELENGKAPI
5	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI PAPUA	SENDIUS WONDA, SH., M.SI	KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROV. PAPUA	HERMAN ICK, SH	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM			100/140/PEM/TAHUN 2017 26 Juli 2017	V	X	V	X	X	X	X	MELENGKAPI
6	BIRO PEREKONOMIA N DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI PAPUA	Dra RIKA MONIM,MM	KEPALA BIRO PEREKONOMIA N DAN SUMBER DAYA MINERAL SETDA PROVINSI PAPUA	BRAMANTTA WARDANA,AP. M.SI	KABAG INVESTASI & LEMBAGA PEREKONOMIAN	bramantyawardana@yahoo.co.id	081344477444	821.29/629/EKO-SDA TAUN 2015 3 November 2015	V	X	X	bpsda.papua.go.id	X	X	X	MELENGKAPI

7	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI PAPUA	NAFTALY YOGI,S.SOS	KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI PAPUA	Dra HENY METEREY,M.SI	KABAG BINA KEMASYARAKATAN		08129059 6788	480/1108 30 Maret 2016	V	X	X	X	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
8	BIRO OTONOMI KHUSUS SETDA PROVINSI PAPUA	ARYOKO RUMAROPEN, N, SP., M.Eng	Pic. KEPALA BIRO OTONOMI KHUSUS SETDA PROV. PAPUA	ARYOKO RUMAROPEN, SP., M.Eng				061/308/BOK 7 Juli 2017	V	X	X	X	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
9	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	SONNY, L RUMFAKER, S.Sos., M.SI	KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV. PAPUA	DEBORA D. SALOSA, S. Hut., MM	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			188.2/231/ Ro-LPB/2018 8 Januari 2018	V	X	X	https/ pengadaan. papua.go.id	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
10	BIRO PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SETDA PROVINSI PAPUA	SUZANA D.WANGGAI S.Pd, M.SocSc	KEPALA BIRO PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SETDA PROV.PAPUA	MATOREN WENDA, SH	BIRO PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SETDA PROV.PAPUA			900/01/ TAHUN 2016 8 Januari 2016	V	X	X	http/ bppkn. papua.go.id	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
11	DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA	JAN JAP L. ORMUSERAI, SH., M.SI	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV. PAPUA	ESTIKO TRY WRIBADYO, SH., M.SI	KEPALA BIDANG PERENCANAAN KEHUTANAN			522/2211/ Dihut/TAhun 2017 19 Juni 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
12	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	Drs. YAN PIET RAWAR	KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROV. PAPUA	Dra. VERONICA KARSINI M.SI	SEKRETARIS DINAS	veronikakaer sini@yahoo. com	08134438 5675	560/265/ TAHUN 2017 17 Maret 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
13	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA	Drg ALOISIUS GOYAL, M. Kes	KEPALA DINAS KESEHATAN PROV.PAPUA	Dr. SILWANUSA, SOEMOELE, Sp.O G (K)	SEKRETARIS DINAS	sumulejdr @yahoo.co m	08114804 871	800/250 3 Juni 2015	X	X	X	Diskes, papua.go.id	X	X	X	X	X	MELENGKAPI

14	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL PAPUA	RIBKA HALUK,S.Sos ,MM	KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL	WASHINGTON LG, A.Ks, M.SI	SEKRETARIS DINAS	Was gaol@yahoo .co.id	08129606 9095	903/53 10 Juni 2015	X	X	X	Dinkesos, papua. go.id	X	X	X	MELENGKAPI
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA	Ir. MIKAEL KAMBUAYA	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA	METTO L. Y. KABUARE, SE, M.SI	SEKRETARIS DINAS			800/1843 1 Juni 2015	X	V	X	Pu.papua. go.id	X	X	X	MELENGKAPI
16	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA	ELIAS WONDA,S.P D.MH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROV.PAPUA	PROTASIJUS LOBVA, S.Sos, M.KP	SEKRETARIS DINAS			188.4/938 2 Februari 2016	X	X	V	Disdik. papua.go.id	X	V	V	MELENGKAPI
17	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. PAPUA	Drs. DAUD NGABALIN, M.SI	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. PAPUA	METTO L. Y. KABUARE, SE, M.SI	SEKRETARIS DINAS	kabuarebs@ gmail.com	08134465 9153	X	X	X	X	X	X	X	X	BELUM ADA SK PPIID
18	DINAS PERHUBUNGA N PROVINSI PAPUA	YUSUF YAMBE YABDI, ST, MT	KEPALA DINAS PERHUBUNGA N PROV.PAPUA	YACOB YANSEN YANTEO, S.Sos,M.SI	SEKRETARIS DINAS		08134485 5888	050/4432/PHB -2015 30 Desember 2015	X	X	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA	Drs. FRANSISCUS XAVERIUS MOTTE, M.SI	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. PAPUA	Drs. RACHMADI	SEKRETARIS DINAS			523/132/DKP	X	X	X	Dkp.papua. go.id	X	X	V	MELENGKAPI
20	DINAS PERKEBUNGAN PROVINSI PAPUA	Ir.JOHN D. NAHUMURY, M.SI	KEPALA DINAS PERKEBUNGAN PROV.PAPUA	Ir. UMAR LATING	SEKRETARIS DINAS		08135400 5148	SK.065/1090/I 11 Juli 2016	X	X	X	Disbun @papua. go.id	X	X	X	MELENGKAPI

21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA		KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTUR A PROV. PAPUA	FRETS JAMES BORAY, SE, M.SI	SEKRETARIS DINAS	fretsamesb oray@gmail.com	081220118880	X	X	X	X	X	X	X	X	http://esdm.papua.go.id	X	X	X	BELUM ADA SK PPHD
22	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTUR A PROVINSI PAPUA	Ir. SAMUEL SIRIWA, M.SI	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTUR A PROV. PAPUA	Ir. RICKY WOWOR, M.SI	SEKRETARIS DINAS	ricky_wowor@gmail.com	081344553607	050.63516 Mei 2017	V	V	V	V	V	V	V	http://pertanian.papua.go.id	V	V	V	LENGKAP
23	DINAS PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA	MARKUS M.E.OLUA,S. Sos, M.SI	KEPALA DINAS PERINDAG PROV. PAPUA	MATTUS TODING,A,Md,S E	SEKRETARIS DINAS	disperindagpapua@gmail.com/mtodi.com/mtodi@gmail.com/1234@gmail.com	082248156461	No. 050/11913 NOVEMBER 2016	X	X	X	X	X	X	X	Disperinda gpaapua@gmail.com	X	X	X	MELENGKAPI
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROVINSI PAPUA	KANSIANA SALLE, SH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROV. PAPUA	RIANTI, SE, M.SI	KEPALA BAGIAN PENGELUARAN INFORMASI PUBLIK	rianti@papua.go.id	081344746572	555/3/DISKOM INFO 8 Januari 2018	V	V	V	V	V	V	V	http://disko.minfo.papua.go.id	V	V	V	LENGKAP
25	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. PAPUA	LUTHER BONGGOIBO, SH	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. PAPUA	Ir. ANTONIUS INDARTO WIBOWO, M.SI	SEKRETARIS DINAS		518/134.a 1 Maret 2017	V	V	V	V	V	V	V	V	http://diskopu.mkn.papua.go.id	X	V	V	MELENGKAPI
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA	Ir.PETRUS D. PASERENG, M.SI	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA	MATHEUS P.KOIBUR, S.PL,MM	SEKRETARIS DINAS	Matheskolbur1@gmail.com	08126195571	524.05/531/ Sekretariat 25 Mei 2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
27	DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA	YUSUF YAMBE YABDI, ST, MT	KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA	IDRIS SALAMA, SE, M.SI	SEKRETARIS DINAS	Keuangandi nsosmaster@gmail.com	081344694221	042/15/tahun 2016 10 Juni 2016	X	X	X	X	X	X	X	http://disorda.papua.go.id	X	X	V	MELENGKAPI

28	DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA	YOSEPH. S. MATUTINA, S.Sos., M.SI	KEPALA DINAS PARIWISATA PROV. PAPUA	SUPRIYONO, A.Par., MM	SEKRETARIS DINAS	priono63py @gmail.com	08521102 7922	556/585/ TAHUN 2017 4 Juli 2017	X	X	X	http://pariwisata.papua.go.id	X	V	V	MELENGKAPI
29	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA	BESEMI GONBO, S.Pd., M.SI	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROV. PAPUA	YAHYA MARKUS MODOUW, S.Sos., M.SI	SEKRETARIS DINAS	Disbudpau a01@gmail.com	08124071 273	188.3/191/ DISBUD 11 Juli 2017	X	X	X	https://ppo.papua.go.id	X	X	X	MELENGKAPI
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERUJIAN TERPADU SATU PINTU PROV. PAPUA	JHONI WAY, S.Hur., M.SI	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERUJIAN TERPADU SATU PINTU PROV. PAPUA	ELYAS WENDA, SE., M.SI	SEKRETARIS DINAS			182.2/146 18 April 2017	X	X	X	https://ppo.papua.go.id	X	X	X	MELENGKAPI
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. PAPUA	Drs. HANS Y. HAMMADI, M.SI	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	FRED EDISON WANGGAI, SH., M.SI	SEKRETARIS DINAS	Marthaman dosir7@gmail.com	08124777 4434	26/BRUH/ TAHUN 2016 20 Juli 2016	X	X	X	http://lingkunganhidup.papua.go.id	X	V	V	MELENGKAPI
32	DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROV. PAPUA	Dr.Jr. NOAK KAPISA, M.Sc	KEPALA DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROV. PAPUA	Ir. MARTHA MANDOSIR	SEKRETARIS DINAS			800/51/DP3 A & KB 16 Maret 2018	X	X	V	https://dpp.papua.go.id	X	X	X	MELENGKAPI
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB PROV. PAPUA	ANIKE RAWAR, Amd. Kep	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	ADELE V.S. PEKADE, SH., MM	KABID PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			800/409- BRM&K 17 Juni 2016	X	X	X	https://dpp.papua.go.id	X	X	X	MELENGKAPI
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASTARAKAT DAN KAMPUNG PROV. PAPUA			IRSYAD YUNUS, S.IP	SEKRETARIS DINAS	irsyadyunus 571@gmail.com	08211188 8871		X	X	X		X	X	X	MELENGKAPI

42	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROV. PAPUA	ALEXANDER K. Y. KAPISA, ST	KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROV. PAPUA	SUHANA	KEPALA SUB BAGIAN UMUM			480/013/BPD/PPD/2017 31-7-2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
43	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA	WILLIAM R. MANDERI, S.IP., M.SI	KEPALA BADAN PENAGGULAN GAN BENCANA DAERAH PROV. PAPUA	BARRAH WISNU RADITVA, ST. M.SI	SEKRETARIS BADAN	bararadi@y ahoo.co.id	08124856 984	900/433 6 April 2017	X	X	V		https://bpbdd.papua.info	V	V	V	V	V	MELENGKAPI
44	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA	GERZON JITMAU, SH, MM	KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA	HARTATI S. IWANGGIN, SE, M.SI	SEKRETARIS BADAN	Hartatisofia wanggin@g mail.com	08114905 53	221 TAHUN 2015 18 DESEMBER 2015	X	X	X		bappenda papua.go.id	X	V	V	V	V	MELENGKAPI
45	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	Drs. ANGGIAT SITUMORAN G, M.SI .AK.CA	INSPEKTUR	MARTHINUS KAMBUAYA, SE, M.SI	SEKRETARIS INSPEKTORAT	marthinuska mbuaya@ya hoo.com	08124778 9312	800/022/ ITPROV 10 Mei 2016	V	V	X		X	V	X	X	X	X	MELENGKAPI
46	SEKRETARIAT DEWAN	Dr. JULIANA J. WAROMI, SE., M.SI	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	ROBERT ARAGE, SE., M.SI	KABAG PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGGAJIAN		08524443 5800	165/50 13 Januari 2017	X	V	V		X	V	V	V	V	V	MELENGKAPI
47	SEKRETARIAT MRP	Drs. WASUOK DEMIANUS, SIEP	SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA	BACHTIAR ARYANTO, ST	KABAG HUMAS DAN UMUM			489/278./SET-MRP/TAHUN 2017 9 Juni 2017	X	X	X		http://mrp.papua.go.id	X	X	X	X	X	MELENGKAPI
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	AKBP. ALEX KORWA	KEPALA SATPOL PP	OMRI I. RUMBINGO, S.STP., M.SI				489/269 8 Maret 2017	V	X	V		Satpolpp.papua.go.id	V	V	V	V	V	MELENGKAPI

49	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA PROVINSI PAPUA	drg. JOSEF RINTA, R, M.Kes, MH	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA PROVINSI PAPUA	FINANSIA E. WATUNGADHA, SKM., M.SI	WAKIL DIREKTUR UMUM, KEUANGAN & OPERASIONAL					800/1264 18 April 2016	X	X	X	X	rsud- jayapura. papua.go.id	X	X	X	V	MELENGKAPI
50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA PROVINSI PAPUA	dr. NIKODEMUS - BARENDIS, M.Kes	DIREKTUR RSUD ADEPURA	SOLEMAN APIEM, SKM., MM	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					188.4/1417/SK /RSUD- ABE/VI/2016 12 Juli 2016	V	X	X	rsud- abepura. papua.go.id	X	X	V	MELENGKAPI		
51	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA PROVINSI PAPUA	DANIEL L. SIMUNAPEN DI, SKM., MM	DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA							300/267/RSJ/ TAHUN 2016 14 Maret 2016	V	X	X	rsj.papua. go.id	X	X	V	MELENGKAPI		
52	SEKRETARIAT KORPRI PROV. PAPUA	CHRISTOTEL ES P. ANSANAY, S.Soc.,M.KP	SEKRETARIS KORPRI							X	X	X	X				X	BELUM ADA SK PPID		

KEPALA BIRO HUMAS & PROTOKOL

SELAKU KETUA PPID

ISRAIL KOLU, SE., M.SI

PEMBINA TK.I

NIP. 19630517 198608 1 006

REKAPITULASI PPID KABUPATEN / KOTA SE – PAPUA TAHUN 2017

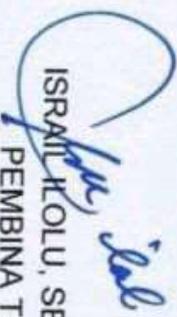
NO	KABUPATEN / KOTA	NOMOR SK	PPID SKPD	ATASAN PPID	KETERANGAN
1.	KABUPATEN KEEROM	105 Tahun 2012 28 November 2012	Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo	Sekda Kab. Keerom	
2.	KABUPATEN PUNCAK JAYA	104 Tahun 2013 16 Desember 2013	Kepala Bagian Humas dan Protokoler	Sekda Kab. Puncak Jaya	
3.	KABUPATEN MERAUKE	800/758/Tahun 2017 25 Oktober 2017	Kepala Dinas Infokom Kab. Merauke	Sekda Kab. Merauke	
4.	KABUPATEN SUPIORI	48 Tahun 2014 21 Februari 2014	Sekda Kab. Supiori	Wakil Bupati	Perlu direvisi, Ketua PPID Bagian Humas atau Kominfo bukan Sekda
5.	KABUPATEN NABIRE	102 Tahun 2014 2 Juli 2014	Kepala Bagian Pengelolaan Data Elektronik	Sekda Kab. Nabire	
6.	KABUPATEN YAPEN	180 Tahun 2015 4 Mei 2015	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Kepulauan Yapen	Sekda Kab. Kepulauan Yapen	
7.	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	SK Nomor	Kepala Bagian Humas Setda Kab. Pegunungan Bintang	Sekda Kab. Pegunungan Bintang	Belum dikirim SK
8.	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	040/246 Tahun 2016 25 April 2016	Kepala Dinas Infokom dan Kabag Humas	Sekda Kab. Boven Digoel	SOP No. 12 Tahun 2016 Tgl. 11 Juli 2016
9.	KABUPATEN MAPPi	SK Tahun 2013	Kepala Dinas Infokom Kab. Mappi	Sekda Kab. Mappi	Belum dikirim SK
10.	KABUPATEN MIMIKA	SK Nomor	Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Perhubungan Kab. Mimika	Sekda Kab. Mappi	Belum dikirim SK
11.	KABUPATEN NUMFOR	243 Tahun 2015 05 November 2015	Kepala Dinas Infokom Kab. Biak Numfor	Sekda Kab. Biak Numfor	

12.	KABUPATEN WAROPEN	SK Nomor	Kepala Bagian Humas dan Infokom Kab. Waropen	Sekda Kab. Waropen	Belum dikirim SK
13.	KOTA JAYAPURA	160 Tahun 2016 27 Juni 2016	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Jayapura	Sekda Kota Jayapura	
14.	KABUPATEN JAYAPURA	SK Nomor	Kepala Dinas Kominfo Kab. Jayapura	Sekda Kab. Jayapura	Belum dikirim SK

Jayapura, 31 Maret 2018

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA PROV. PAPUA

SELAKU PPID UTAMA, 


ISRAFIL KOLU, SE, M.Si
PEMBINA TK.I

NIP. 19630517 198608 1 006

DAFTAR DATA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2017

INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SETIAP SAAT

NO	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PELABAT YANG MENGUJAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI (SOFT & HARD COPY)	MASA RETENSI ARSIP
1	Surat Keputusan PPID SKPD Prov. Papua dan PPID Kab/Kota	SK PPID Provinsi Papua, dan SK PPID Kab/Kota Provinsi Papua	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2012	Hard copy/Soft copy	10 tahun
2	Tata Cara memperoleh Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Tata cara memperoleh Informasi publik	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2013	Hard copy/Soft copy	
3	Daftar Informasi publik Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	DIP Biro humas dan Protokol yang berisi informasi tersedia setiap saat, Berkala, Serta Merta dan Informasi yang dikecualikan	Kasubag Analisis Informasi	Kabag Humas	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
4	SOP Pelayanan Informasi	Prosedur kerja dalam melakukan pelayanan Informasi Publik	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
5	Kumpulan Peraturan terkait tugas pokok dan Fungsi	Peraturan berkenaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
6	Peraturan Gubernur Provinsi Papua No 28 Tahun 2013 tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	Pedoman pengelolaan dan layanan Informasi dan dokumentasi publik	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2013	Hard copy/Soft copy	10 Tahun
7	Keputusan Gubernur Papua Nomor 158 Tahun 2011 tentang Penajbat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) pada Organisasi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Susunan Keanggotaan PPID Provinsi Papua	Kasubag Peliputan	Kabag Humas	2011	Hard copy/Soft copy	10 Tahun
8	Keputusan Gubernur Papua Nomor 82 tahun 2012 tentang Perubahan lampiran 1 Keputusan Gubernur Papua Nomor 158 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) pada Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Susunan Keanggotaan PPID Provinsi Papua	Kasubag Peliputan	Kabag humas	2012	Hard copy/Soft copy	10 Tahun
9	Maklumat Pelayanan Publik	keseediaan dan kesiapan serta sanksi apabila tdk melaksanakan pelayanan informasi	Kasubag Analisis Informasi	Kabag humas	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Motto Pelayanan Publik	Motivasi, semangat untuk mencapai tujuan biro humas Prov. Papua dalam pelaksanaan tugas	Kasubag Analisis Informasi	Kabag humas	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
11	SOP di Lingkungan Biro humas dan Protokol Setda Prov. Papua	Pedomana dalam pelaksanaan tugas pook dan fungsi	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
12	Struktur Organisasi Biro Humprot Setda Provinsi Papua	Susunan pejabat Biro humas dan Protokol Provinsi Papua 2017	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
13	Struktur PPID Utama Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Susunan keanggotaan PPID Provinsi Papua beserta tugas dan fungsi PPID	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
14	Buku Potensi dan Peluang Investasi Provinsi 2014	Berisi data dan informasi investasi pemerintah provinsi papua tahun 2014	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2014	Hard copy/Soft copy	10 Tahun
15	Peraturan Gubernur Provinsi Papua No 28 Tahun 2013 tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	Pedoman pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi publik	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2013	Hard copy/Soft copy	10 Tahun
16	Tata cara permintaan pemasangan balho Pemerintah Provinsi Papua	Publikasi kegiatan- kegiatan pemprov Papua	Kasubag Publikasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
17	Foto - foto Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda serta Asisten I,II,dan III	Foto- foto resmi Gubernur, Wakil dan Sekda dengan menggunakan berbagai busana resmi, jas, pakaian kebesaran, batik papua, olah raga	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	Setiap hari	Hard copy/Soft copy	5 tahun
18	Dokumentasi Foto dan CD Kegiatan Pemerintah Provinsi Papua	Dokumentasi foto kegiatan dalam album foto	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	Setiap hari	Hard copy/Soft copy	5 tahun
19	Daftar katalog buku perpustakaan	Katalog buku yang ada di perpustakaan	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	5 tahun
20	Daftar Arsip Surat Menyurat	Kumpulan surat- surat dinas /Mou,SK,Surat Masuk dan keluar, Kontrak dll	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 Tahun
21	Data dan Informasi Kegiatan PPID	Jumlah PPID Provinsi Papua, PPID Kab/Kota,	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 Tahun
22	Leaflet Tata cara Permohonan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mekanisme tata permohonan informasi dan tata cara pengajuan sengketa informasi	Kasubag Publikasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copi	2 Tahun
23	Leaflet Tata cara Permohonan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mekanisme tata permohonan informasi dan tata cara pengajuan sengketa informasi	Kasubag Publikasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Leaflet tata cara LaPor	mekanisme tata cara melapor	Kasubag dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
25	Buku Kumpulan Sambutan	Sambutan Gubernur ,wakil membuka dan menutup kegiatan	Kasubag Hubungan Kelembagaan	Kabag Humas	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
26	Buku Kumpulan Peraturan- peraturan Undang-undangan keterbukaan Informasi Publik	berisi UU No 14 tahun 2008, PP 61 Pelaksanaan UU KIP No 14 tahun 2008, Pergub No 28 Rahun 2013, SOP PPIID Provinsi Papua	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
27	Kliping Kumpulan Berita Kegiatan pimpinan	Kumpulan kegiatan pimpinan yang diliput media cetak untuk dikliping per bidang	Kasubag dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
28	buku Kumpulan Analisis Informasi terkait pemberitaan	Pemberitaan negatif yang telah dianalisis	Kasubag Analisis	Kabag Humas	2017	Hard copy	10 tahun
29	Data dan Informasi Pemerintah Provinsi Papua 4 Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur	Indikator keerhasilan 4 tahun kepemimpinan Papua bangkit, mandiri dan Sejahtera	Kasubag dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2016	Hard copy/Soft copy	10 tahun
30	Mitra Jurnalis/Wartawan yang meliput Kegiatan pemerintah prov Papua	Jumlah wartawan yang berada di pres room yang meliput kegiatan pemerintah provinsi papua	Kasubag Kerjasama Media	Kabag Humas	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
31	Media Cetak yang meliput kegiatan pimpinan dalam kontrak kerjasama	Media lokal, nasional	Kasubag hubungan Kelenbagaan	Kabag Humas	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
32	Data - kunjungan tamu pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Tamu Dalam, luar Negeri	Kasubag Tamu	Kabag Protokol	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
33	Data kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua (acara)	Acara kegiatan pemerintah Provinsi Papua yang difasilitasi Humprot Papua	Kasubag Acara	Kabag Protokol	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
34	Agenda Jadwal perjalanan dinas yang telah dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Asil, Il, dan III	Perjalanan Dinas Gubernur, Wakil Sekda dan Asisten	Kasubag Acara	Kabag Protokol	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
35	Agenda SPPD Pimpinan yang telah disetujui	Jumlah SPPD yang diterbitkan	Kasubag Perjalanan	Kabag Protokol	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
36	Agenda SPPD Pimpinan yang telah disetujui	Jumlah SPPD yang diterbitkan	Kasubag Perjalanan	Kabag Protokol	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
37	Peraturan Daerah Provinsi Papua No 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Batang tubuh dan konsideran perda No 19 tentang susunan dan struktur OPD Provinsi Papua dan penjelasan	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
38	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor 188.4/10/401/SET tentang Standar operasi Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	sebagai pedoman dan acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang PPIID dalam menyediakan informasi dan dokumentasi publik	Kasubag tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2014	Hard copy/Soft copy	10 tahun
39	Nama OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	berisi nama SKPD, Nama Pimpinan SKPD dan alamat	kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
40	No Telepon/Fax Kab/Kota Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	No Fax dan telepon Kab/Kota Papua dan Papua Barat	kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
41	Peliputan Media Cetak	Jumlah Media Lokal, Jumlah Media Nasional	Kasubag Kerjasama Media	Kabag Humas	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIJUMUKAN SECARA BERKALA							
1	Profil Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Sekda, Asisten I,II, dan III	berisi alamat, ruang lingkup kegiatan riwayt hidup, pendidikan, pengalaman kerja/organisasi	Kasubag Dokumentasi	Kabag Dok- Publikasi	2013	soft & hard copy	10 tahun
2	Profil Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Visi Misi,Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Pejabat Eselon II,III,IV,Staf, alamat, no kontak,email,	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
3	Data Nominatif Pegawai Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Urutan Keangkatan, Informasi struktur PNS, Honorer, data pejabat struktural dan fungsional	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Soft dan hard Copy	10 Tahun
4	Pelatihan dan pendidikan PNS Humprot Papua	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan Pendidikan Formal dan in formal	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	soft & hard copy	10 tahun
5	Data Penerima & Kehormatan dan penghargaan	Jumlah Pejabat/Pegawai yang telah memperoleh penghargaan/kehormatan	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	soft & hard copy	10 tahun
6	Kumpulan Kontrak Kinerja Pejabat dan Staf Humprot Prov. Papua	Kontrak Kinerja PNS Humprot Prov. Papua	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	soft & hard copy	10 tahun
7	Rekapitan Daftar Hadir Pejabat dan Staf Fungsional umum dalam setahun	Jumlah Kehadiran Pejabat dan Staf Fungsiona umum Humprot Papua	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	soft & hard copy	10 tahun
8	Ringkasan Program dan Kegiatan	Nama Program dan kegiatan tahun anggaran 2017	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Gambaran umum Biro humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	kondisi biro humas dan protokol, SDM, sarana Prasarana	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
10	Profil Singkat Pejabat Struktural Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Nama, NIP, pendidikan, alamat, agama,	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
11	Rencana strategi (Renstra) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya, kinerja Pelayanan, Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi, Isu strategis, Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran jangka menengah, strategi Kebijakan	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
12	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Humas dan Protokol	capaian/realisasi kegiatan dalam 1 tahun, Hambatan, Analisis kegiatan dalam 1 tahun	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
13	Rencana Kerja anggaran (RKA) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Rincian anggaran pendapatan dan belanja SKPD, Rincian Belanja Tidak Langsung Biro Humas, Rincian Belanja langsung Humas, Rincian Belanja Langsung Prooram & Kegiatan	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
14	Daftar Anggaran DPA (Biro) Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Anggaran per program kegiatan Biro Humas	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
15	Penetapan Kinerja (TAPKIN) Biro Humas dan Protokol	Penetapan Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
16	Program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua (pertahun)	nama Program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol, setda Provinsi Papua	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
17	Penanggung jawab Program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	SK PPTK, PPK	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
18	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Laporan Pertanggungjawaban Pejabat daerah (LPPD) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Struktur Organisasi, Tujuan, sasaran dan Program, Program dan kegiatan Tahunan, Penetapan kinerja	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Jadwal pelaksanaan Program dan kegiatan Biro humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Jadwal pelaksanaan kegiatan Bagian humas, Protokol, Bagian dokumentasi dan Publikasi	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
20	Target capaian program dan kegiatan Biro humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Target capaian Program dan kegiatan	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
21	Neraca Biro humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Neraca Keuangan biro humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
22	Laporan Tahunan, bulanan dan Tahunan PPIID Utama	Laporan pelayanan informasi publik	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy/soft copy	10 tahun
23	Ringkasan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan/Kas	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
24	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan tugas anggota Biro Humas dan Protokol	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
25	Laporan Tahunan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Laporan biro humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
26	Kegiatan Pelayanan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi, yang dilayani, jumlah keberatan, jumlah sengketa informasi, jumlah informasi yang ditolak	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard copy/Soft copy	10 tahun
27	Laporan Aset	Daftar aset Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	Kasubag Tata Usaha	Kabag Dok- Publikasi	2017	Hard Copy	10 tahun
INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN SERTA MERTA							
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN							

Jayapura, Maret 2018

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA PROVINSI PAPUA

ISRAILILOLU SE., M.SI

NIP. 196305171986081006

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KELENGKAPAN PPID SKPD PROVINSI PAPUA TAHUN 2017

No	NAMA SKPD	KELENGKAPAN PPID										Media	Tindak Lanjut	Keterangan
		SK	SOP	DIP	DESK LAVAMAN	WEBSITE	LAPORAN	ANGGARAN						
1	Biro Hukum Setda Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://hukum.papua.go.id	X	X		V		MELENGKAPI
2	Biro Umum Setda Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://humas.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI
3	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua	V	V	V	V	V		http://orpa.papua.go.id	V	V		V		LENGKAP
4	Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	V	V	V	V	V			X	X		X		MELENGKAPI
5	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua	V	V	X	V	V			X	X		X		MELENGKAPI
6	Biro Perencanaan dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://bpsda.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI
7	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
8	Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	X	X	X	X	X		https://pengadaan.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI
10	Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://bopkln.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI
1	Dinas Kehutanan Provinsi Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
2	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
3	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://dinkes.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI
4	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://dinkesos.papua.go.id	X	X		V		MELENGKAPI
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua	V	X	V	X	X		http://pu.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI
6	Dinas Pendidikan Provinsi Papua	V	X	X	V	V		http://disdik.papua.go.id	X	V		V		MELENGKAPI
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Papua	X	X	X	X	X			X	X		V		MELENGKAPI
8	Dinas Perhubungan Provinsi Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://dkp.papua.go.id	X	X		V		MELENGKAPI
10	Dinas Perkebunan Provinsi Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	X	X	X	X	X		http://esdm.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI
12	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua	V	V	V	X	X		http://pertanian.papua.go.id	V	V		V		MELENGKAPI
13	Dinas Perindutrian dan Perdagangan Provinsi Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		LENGKAP
14	Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua	V	V	V	V	V		http://diskominfo.papua.go.id	V	V		V		MELENGKAPI
15	Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Papua	V	V	V	V	V		http://diskopunkn.papua.go.id	X	X		V		LENGKAP
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
17	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://disorda.papua.go.id	X	X		V		MELENGKAPI
18	Dinas Pariwisata Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://pariwisata.papua.go.id	X	V		V		MELENGKAPI
19	Dinas Kebudayaan Provinsi Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
20	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov. Papua	V	X	X	X	X		https://ppc.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
22	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Prov. Papua	V	X	X	X	X			X	X		X		MELENGKAPI
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. Papua	V	X	X	X	X		http://lingkungan.hidup.papua.go.id	X	V		V		MELENGKAPI
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Prov. Papua	V	X	X	X	X		https://ppp.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI
25	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua	V	X	X	V	X			X	X		V		MELENGKAPI
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua	V	V	X	X	X		http://bpkad.papua.go.id	X	X		X		MELENGKAPI

2	Badan Kepegawajan Daerah Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://bkd.papua.go.id	X	V	X			MELENGKAPI
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua	V	X	X	X	X		https://pengembangan.sdm.papua.go.id	X	X	X		sk Perlu direvisi	MELENGKAPI
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Papua	X	X	X	X	X		http://bappeda.papua.go.id	X	V	V		sk Belum ada	MELENGKAPI
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	V	X	X	X	X		X	X	X	X		sk Perlu direvisi	MELENGKAPI
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua	V	X	X	X	X		X	X	X	X			MELENGKAPI
7	Badan Perhubungan Daerah Prov. Papua	V	X	X	X	X		X	X	X	X			MELENGKAPI
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua	V	X	X	X	V		https://bpbhd.papua.info/	V	V	V			MELENGKAPI
9	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Papua	V	X	X	X	X		http://bappenda.papua.go.id	X	V	V		sk Perlu direvisi	MELENGKAPI
10	Inspektorat Provinsi Papua	V	V	V	V	X		X	V	X	X			MELENGKAPI
11	Sekretariat Dewan	V	X	X	V	V		X	V	V	V			MELENGKAPI
12	Sekretariat MRP	V	X	X	X	X		http://mrp.papua.go.id	X	X	X			MELENGKAPI
13	Satuan Polisi Pamotih Praja	V	V	X	X	V		http://satpol.papua.go.id	V	V	V		sk Perlu direvisi	MELENGKAPI
14	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Provinsi Papua	V	X	X	X	X		http://rsud.jayapura.papua.go.id	X	X	X		sk Perlu direvisi	MELENGKAPI
15	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua	V	V	X	X	X		http://rsud.abepura.papua.go.id	X	X	X			MELENGKAPI
16	Rumah Sakit Jiwa Abepura Provinsi Papua	V	V	X	X	X		http://rsj.papua.go.id	X	X	X			MELENGKAPI
17	Sekretariat KORPRI Prov. Papua	X	X	X	X	X		X	X	X	X		Perlu dibuat SK PPID	MELENGKAPI

Keterangan :
X : Tidak Ada
V : Ada



SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID UTAMA
T. E. A. HERY DOSINAEN, S.I.P. M.KP
PEMBINA UTAMA
NIP. 19670504 199011 1 001

Dokumentasi Kegiatan PPID Utama Provinsi Papua pada kunjungan ke PPID SKPD dalam rangka Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik



Kunjungan di Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua



Kunjungan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Prov. Papua



Kunjungan di Biro Organisasi Setda Provinsi Papua



Kunjungan di Sekretariat KORPRI Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Prov. Papua



Kunjungan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Kebudayaan Provinsi Papua



Kunjungan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua



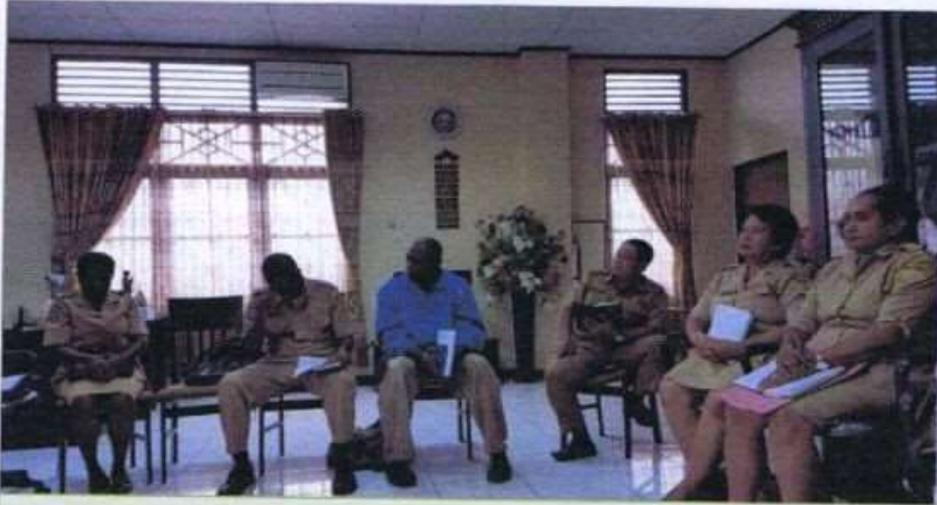
Kunjungan di Dinas Kehutanan Provinsi Papua



Kunjungan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Prov. Papua



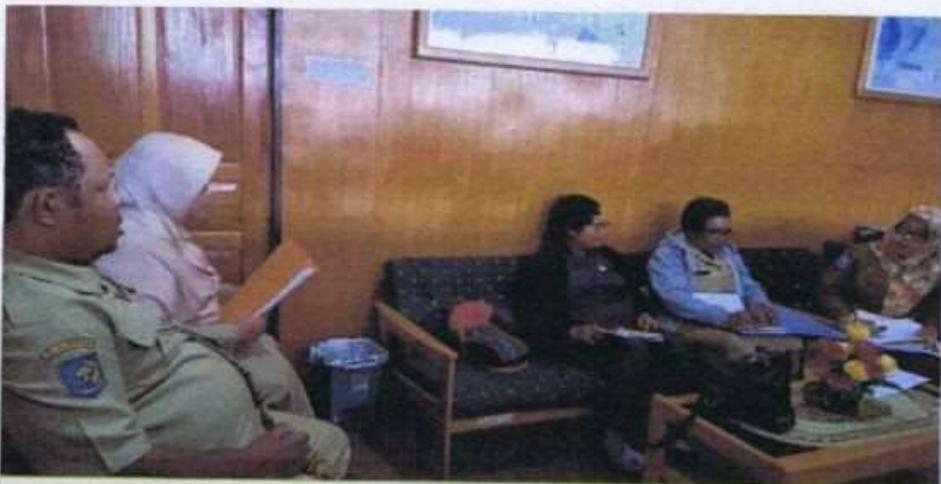
Kunjungan di Dinas Perhubungan Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Pariwisata Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua



Kunjungan di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua



Kunjungan di Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda
Prov. Papua



Kunjungan di Dinas Sosial Provinsi Papua



Kunjungan di Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua



Kunjungan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua



Kunjungan di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua



Kunjungan di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia



Kunjungan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua



Kunjungan di Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua



Kunjungan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua



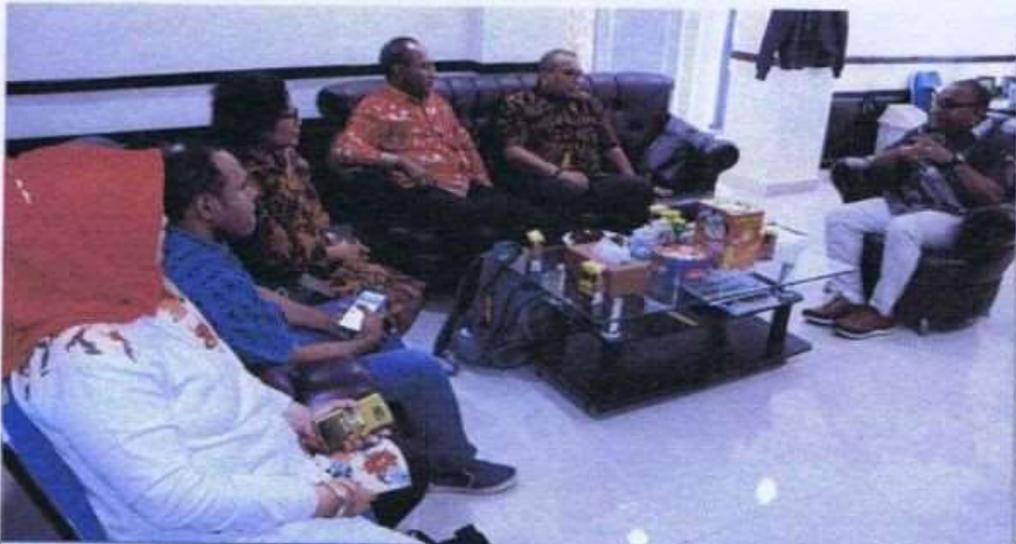
Kunjungan di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua



Kunjungan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua



Kunjungan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua



Kunjungan di Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua



DESK PELAYANAN



RUANG TAMU



RUANG PELAYANAN INFORMASI





RUANG EDIING



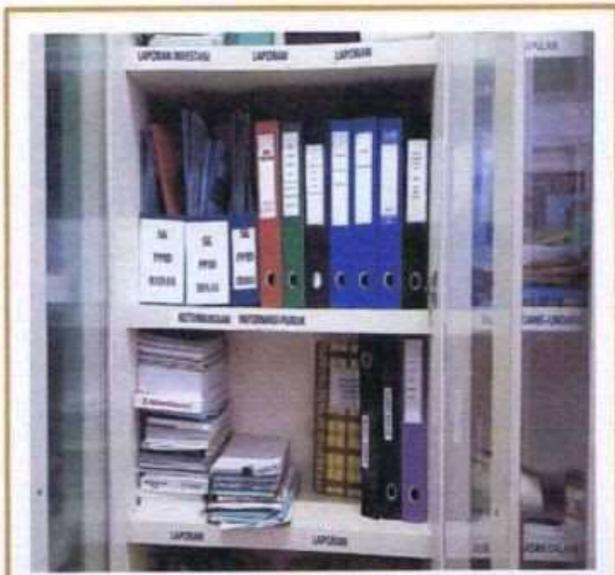
RUANG RAPAT



RUANG ATK



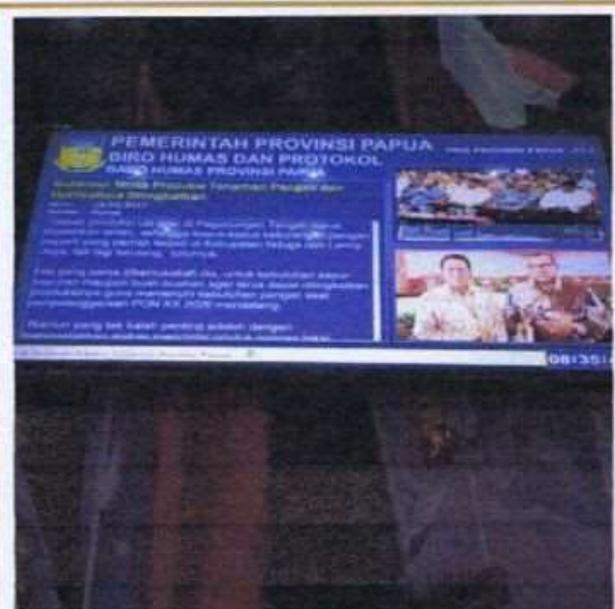
RUANG TUNGGU TAMU KEPALA BIRO



PERPUSTAKAAN SURAT MASUK-SURAT KELUAR



KOTAK KRITIK & SARAN



MEDIA WOOL



PERPUSTAKAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PERTAMA:
SAMPAKAN KITORANG PU LAPORAN LEWAT SITUS
<http://lapor.papua.go.id>
ATO BISA JUGA
LEWAT SMS KE
NOMOR 5708

KEDUA:
JANGAN LUPA KALO KITORANG
MO SAMPAKAN POKOK
PERMASALAHAN, USAHANAN
KASI TAU SECARA JELAS,
LENGKAP DAN KRONOLOGIS
SUPAYA MUDAH UNTUK
DUMENDI!

KETIGA:
KASIH TAU WAKTUNYA DAN
TEMPAT KEJADIAN
DICALAM KITORANG
PU LAPORAN

KEEMPAT:
DALAM KITORANG PU LAPORAN
GUNAKAN BAHASA INDONESIA
YANG SOPAN, BAIK DAN BENAR

KELIMA:
KALO BISA,
LAMPIRKAN BUKTI
PENDINGING
APABILA TERSEDIA

LIFLET LAPOR

LANGKAH 1
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LANGKAH 2
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LANGKAH 3
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LANGKAH 4
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LANGKAH 5
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LIFLET PPID

**PEMBANGUNAN DAN
LAYANAN PUBLIK TRA
MEMUJAKAN AYO TRA
BERSAMA
LAPORKAN SEMUANYA
DE**

<http://lapor.papua.go.id>
atau melalui SMS
Ketik : **LAPOR** ke nomor
Korban ke : 5708

**ATAU DAPAT
MENGUNGUNG
LANGSUNG KE:**

**BIRO HUMAS DAN
PROTOKOL SETDA
PROVINSI PAPUA
SEBAGAI
PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
(PPID)**

LAPOR!
LAYANAN ASPRAS DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT

LIFLET LAPOR

**TATA CARA
PERMOHONAN
INFORMASI
&
PENYELESAIAN
SENGKETA
INFORMASI**

LANGKAH 1
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LANGKAH 2
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LANGKAH 3
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LANGKAH 4
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LANGKAH 5
Pilihlah instansi yang akan dipaparkan masalahnya. Untuk itu, pilihlah instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

LIFLET TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



SOTK BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA PROVINSI PAPUA



KOMPUTER PPID UTAMA
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA PAPUA